

## **SUMBERDAYA ALAM PARIWISATA**

Pariwisata adalah salah satu sektor pembangunan yang dapat dilihat secara terpisah. Pembangunan di dalamnya juga terkait dengan sektor lain. Misalnya, pendidikan di bidang ini. Permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor pendidikan antara lain mutu masukan, sumber daya termasuk di dalamnya adalah masalah guru, proses belajar-mengajar, pengelolaan yang kurang efektif dan efisien, hasil belajar yang kurang diharapkan serta tingkat income yang kurang memadai dan masih banyak lagi.

Berdasarkan hasil penelitian Ibrahim Musa dkk. Indonesia telah meletakkan pariwisata sebagai salah satu sektor penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun kenyataannya, konsep pariwisata, pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih mengalami banyak kendala baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Kendala tersebut terutama terletak pada masalah-masalah substansial seperti esensi pariwisata berkelanjutan itu sendiri, pengembangan produk, pasar dan pemasaran, serta dampaknya bagi berbagai lapisan masyarakat. Akar permasalahan dari kondisi tersebut sudah jelas, yaitu belum adanya kebijakan pariwisata yang jelas dan terpadu.

Pengembangan pariwisata alam memiliki prospek yang sangat baik apabila digarap dengan sungguh-sungguh. Hutan dengan segala potensi yang dimilikinya, baik keanekaragaman flora dan fauna maupun keunikan serta keindahan alamnya, sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata yang sangat menarik. Hal ini dapat kita buktikan, antara lain salah satu potensi satwa yang kita miliki yakni Komodo yang berada di Taman Nasional Komodo, telah menjadi perhatian dunia internasional.

Demikian pula dengan kekayaan taman laut yang tersebar hampir di seluruh wilayah perairan laut Indonesia. Salah satu contohnya adalah Taman Nasional Laut Bunaken Manado Tua. Taman Nasional ini sudah tidak asing lagi bagi wisatawan mancanegara yang memiliki hobi menyelam (*snorkling* dan *diving*).

Di samping itu, masih banyak obyek wisata alam lainnya yang memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh negara lain, seperti di kawasan Taman Nasional (TN); Badak Jawa di TN. Ujung Kulon, Jalak Bali di TN. Bali Barat, salju abadi di TN. Lorentz dan berbagai potensi flora. Apabila Dari 39 Taman Nasional dengan luas  $\pm 15$  juta hektar, yang tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia tersebut dapat dikembangkan secara

optimal, maka akan dapat mendatangkan devisa negara yang tidak sedikit dari sektor pariwisata alam.

Pariwisata alam memiliki 4 (empat) ciri-ciri utama yang perlu mendapatkan perhatian, yakni :

- ❖ Obyek-obyek yang akan dikembangkan adalah obyek-obyek yang ada di alam (hutan, kebun, pantai/laut,) dan budaya yang tidak mengalami perubahan baik bentang alam maupun sumber dayanya.
- ❖ Dalam pemanfaatannya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangat kecil namun sebaliknya dampak positif yang diperoleh dapat menunjang upaya-upaya pelestarian kawasan atau obyeknya itu sendiri, sesuai dengan aspek konservasi.
- ❖ Masyarakat di sekitar kawasan atau obyek dapat memperoleh keuntungan langsung dari kegiatan pariwisata alam tersebut karena mereka ikut terlibat di dalamnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Adanya unsur pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk ikut serta melestarikan obyek. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka pembangunan pariwisata alam harus diarahkan kepada pembangunan pariwisata alam yang berbasiskan kepada masyarakat (*community based-tourism*), agar masyarakat di sekitar kawasan dapat

merasakan manfaat secara langsung dari kawasan tersebut.

Berbagai kebijaksanaan telah dikeluarkan untuk memacu perkembangan kegiatan pariwisata alam, yakni dengan adanya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dengan PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Swasta, BUMN, BUMD, Koperasi dan Perorangan untuk mengembangkan usaha pariwisata alam di Kawasan Pelestarian Alam seperti di zona pemanfaatan taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya dengan mengikutsertakan masyarakat di sekitarnya.

Namun demikian , ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan lagi. Salah satu diantaranya adalah prosedur untuk memperoleh Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) khususnya bagi investor menengah ke bawah dan perorangan masih dirasakan sangat panjang dan berbelit-belit. Demikian pula keterlibatan masyarakat setempat

perlu lebih diperjelas lagi agar mereka bisa memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjadi pelaku yang sebenarnya dalam kegiatan pengusahaan pariwisata alam.

Selain itu, ijin pengusahaan pariwisata alam yang ada juga perlu dikelompokkan lagi menurut jenis kegiatan usaha, jangka waktu pengusahaan, dan kriteria pengusaha yang akan menanamkan modalnya, sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaannya.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Kedua peraturan ini menekankan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pengelolaan pariwisata alam harus pula memberikan peran nyata pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten /Kotamadya.

Untuk menjadikan suatu kawasan menjadi objek wisata yang berhasil haruslah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- ❖ Faktor kelangkaan (Scarcity) yakni: sifat objek/atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain, termasuk kelangkaan alami maupun kelangkaan ciptaan.

- ❖ Faktor kealamiahannya (Naturalism) yakni: sifat dari objek/atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia. Atraksi wisata bisa berwujud suatu warisan budaya, atraksi alam yang belum mengalami banyak perubahan oleh perilaku manusia.
- ❖ Faktor Keunikan (Uniqueness) yakni sifat objek/atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan objek lain yang ada di sekitarnya.
- ❖ Faktor pemberdayaan masyarakat (Community empowerment). Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dapat diberdayakan dengan keberadaan suatu objek wisata di daerahnya, sehingga masyarakat akan memiliki rasa memiliki agar menimbulkan keramah-tamahan bagi wisatawan yang berkunjung.
- ❖ Faktor Optimalisasi lahan (Area optimalsation) maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata alam digunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar. Tanpa melupakan pertimbangan konservasi, preservasi, dan proteksi.
- ❖ Faktor Pemerataan harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar untuk kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung

serta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta ketertiban masyarakat tuan rumah menjadi utuh dan padu dengan pengelola kawasan wisata.

Salah satu contoh dari wisata sosial dapat berupa perjalanan yang dilakukan seseorang ketempat lain atau ke luar negeri, untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan–kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan–kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

Contoh lain dari wisata sosial ini juga dapat berupa berkunjung ke tempat ziarah. Namun wisata ke tempat ziarah ini sering dikaitkan dengan aspek lain yaitu agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat–tempat suci, ke makam–makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.

Wisata ziarah ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula

untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Dalam hubungan ini, orang-orang Khatolik misalnya melakukan wisata ziarah ini ke Istana Vatikan di Roma, orang-orang Islam ke tanah suci, orang-orang Budha ke tempat-tempat suci agama Budha di India, Nepal, Tibet dan sebagainya. Di Indonesia banyak tempat-tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama tertentu, misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Basakih di Bali, Sendangsono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, Gunung Kawi, makam Bung Karno di Blitar dan sebagainya. Untuk memfasilitasinya saat ini sudah mulai banyak agen-agen pariwisata yang menawarkan jasa berwisata ke tempat-tempat ziarah seperti disebutkan diatas tadi.

Para wisatawan melakukan wisata sosial ini dapat dikarenakan mereka tertarik dengan budaya yang unik atau dengan kata lain berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal maka, peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai khasanah kekayaan pola pikir budaya mereka.

Salah satu tempat tujuan wisata sosial ini adalah Denpasar, Bali. Di Denpasar, Bali ada suatu kegiatan sosial masyarakat yang sangat menarik minat bagi para

calon wisata yaitu sistem pengairan atau irigasi berbasis masyarakat yang dikenal dengan istilah subak. Sampai saat ini system pengairan subak masih tetap dipertahankan sebagai salah satu prinsip pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Dirjen SDA Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) Roestam Sjarief kepada Pembaruan di Denpasar mengatakan, "Apa yang diperlihatkan petani di Bali dalam pemanfaatan air sungguh efisien.

Karena itulah subak sangat menonjol dan populer hingga ke tingkat internasional. Subak bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain," Menurut beliau juga, pengelolaan air yang diterapkan para petani di Bali itu bisa tetap bertahan, terutama karena didukung sistem sosial budaya masyarakat yang sangat kuat. Jika memperhatikan lebih jauh, ada sesuatu yang mengagumkan dalam subak, yakni terciptanya keharmonisan antaranggota sehingga keberadaan air betul-betul dirasakan dan dihargai. Kenyataan sosial itu yang menjadikan subak bertahan lama. Itulah bentuk kearifan lokal masyarakat Bali. Dalam hal pengelolaan SDA Bali telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 1972 tentang Irigasi di Bali. Dalam Perda tersebut pengelolaan irigasi atau SDA lebih banyak melihat aspek sosial budaya masyarakat Bali. Pengelolaan SDA ini setidaknya dapat menjadi aset wisata sosial

Jika mempertimbangkan pariwisata sosial dari sudut pandang pembangunan yang berkesinambungan, Prof. Dr. James J. Spillane, S.J. dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pariwisata (P3-Par) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta menyebut tiga unsur kunci yang harus diperhatikan:

- Pertama, kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan
- Kedua, kualitas sumber daya yang dapat dipasarkan dan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar yang mempunyai sumber daya
- Ketiga, unsur kunci dan hubungan timbal balik yang dikonstruktif antara ketiga unsur kunci mencerminkan filsafat pariwisata budaya yang berkesinambungan.

Kualitas pengalaman tidak mungkin ada tanpa adanya pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumber daya dan kualitas kehidupan. Apabila kualitas kehidupan dan kualitas sumber daya terganggu oleh suatu bentuk pembangunan yang tidak sesuai, kualitas pengalaman juga akan ikut terganggu.

Warisan budaya yang ada haruslah selalu terjaga karena dengan terjaganya warisan budaya tersebut mampu mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitarnya dengan menjadikannya sebagai aset wisata. Sasaran pariwisata sosial-budaya adalah kesinambungan

antara masa lampau dan masa depan. Dalam usaha ini, perlu dihasilkan suatu perlindungan dan pengalaman yang lebih baik bagi para wisatawan, juga peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin baik pengalaman yang diperoleh wisatawan dan semakin baik kondisi kehidupan masyarakat setempat di sekitar objek wisata atau monumen, semakin kecil kemungkinan kerusakan warisan budaya.

*Sumber :*

<http://www.dephut.go.id/temp/index2.php?lempar=dlsp.php&&idlempar=3&&flag=1>

<http://www.sinarharapan.co.id/feature/wisata/2004/0624/wis02.html>

<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=543&id=153>